PKI DAN AURI

D. N. AIDIT

Menteri/Wakil Ketua MPRS/
Ketua CC PKI

Jajasan „Pembaruan"
Djakarta 1963

rentjana kulit : nugroho

Sekedar Pengantar

Pada tanggal 5 April 1963 Menteri/Wakil Ketua MPRS/Ketua CC PKI D. N. Aidit, atas undangan Departemen AURI telah memberikan tjeramah dihadapan perwira² AURI di Departemen AURI.

Tjeramah itu bertemakan *„Manipol-Usdek ditindjau dari segi Marxisme"* dan diberi djudul *„Manipol-Usdek bukan hanja tidak bertentangan, tetapi sesuai dengan Marxisme."*

Atas persetudjuan pentjeramah tjeramah itu kami bukukan dengan nama *„PKI dan AURI."* Dengan usaha membukukan ini kami mengharap bisa memberikan sekedar sumbangan pada tudjuan tjeramah itu sendiri, jaitu „pemaduan jang erat atau pengintegrasian antara kehidupan Angkatan Bersendjata, termasuk Angkatan Udara RI ... dengan praktek sosial perdjuangan massa Rakjat", lebih memperdalam „saling-mengenal dan saling-mengerti diantara kita, diantara berbagai golongan Rakjat Indonesia, terutama golongan Komunis dengan Angkatan Bersendjata, termasuk AURI" dan untuk ber-sama² melaksanakan Manipol setjara konsekwen.

Penerbit

Mei 1963.

PENDAHULUAN

Atasnama kaum Komunis Indonesia saja menjampaikan rasa terimakasih dan penghargaan jang se-besar²nja kepada AURI jang telah mengambil inisiatif untuk menjelenggarakan tjeramah dengan tema „*Manipol-Usdek ditindjau dari segi Marxisme*".

Tjeramah dengan tema ini saja anggap sangat penting mengingat:

a) pentingnja ada pemaduan jang erat atau pengintegrasian antara kehidupan Angkatan Bersendjata, termasuk Angkatan Udara RI, sebagai salahsatu alat kekuasaan negara, dengan praktek sosial perdjuangan massa Rakjat. Ini berarti usaha mulia untuk menempatkan para anggota Angkatan Udara dalam barisan Rakjat Indonesia jang sedang berdjuang melaksanakan Manipol setjara konsekwen.

b) pentingnja saling-mengenal dan saling-mengerti diantara kita, diantara berbagai golongan Rakjat Indonesia, terutama antara golongan Komunis dengan Angkatan Bersendjata, termasuk AURI. Ini berarti usaha mulia untuk memperkokoh kegotongrojongan nasional anti-imperialis dan anti-feodal jang berporoskan NASAKOM. Ini merupakan djawaban jang tepat terhadap kaum imperialis jang dengan keras berusaha untuk

mempertentangkan Angkatan Bersendjata dengan PKI.

c) adanja sementara pandangan jang menjesatkan mengenai Manipol, jaitu dari kaum Manipolis munafik, dan adanja sementara pandangan jang mengira bahwa Manipol bertentangan dengan Marxisme, dan pandangan lain jang mengira bahwa Manipol adalah Marxisme.

Untuk dapat memahami *„Manipol-Usdek ditindjau dari segi Marxisme"* atau lebih tepat *„Manipol sebagai Garis Besar Haluan Negara R.I."* sangatlah penting kita mempeladjari latarbelakang sedjarah jang melahirkan Manipol, tentang sjarat² objektif jang mendjadi landasan bagi perkembangan Manipol selandjutnja.

Adalah tidak masuk akal untuk merenggut Manipol dari proses perkembangan perdjuangan Rakjat Indonesia dan memisahkannja dari kehidupan praktis, tetapi djustru adalah satu keharusan untuk mengintegrasikan Manipol setjara total dengan perdjuangan Rakjat Indonesia.

MANIPOL SEBAGAI PROGRAM BERSAMA RAKJAT INDONESIA

Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipol, jaitu Pidato Presiden Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1959, dengan perintjiannja oleh DPA, beserta pedoman² pelaksanaannja, telah disahkan sebagai Garis Besar Haluan Negara R.I. oleh Sidang Pertama MPRS pada tanggal 19 November 1960.

Membitjarakan, mempeladjari dan melaksanakan Manipol haruslah keseluruhannja, jaitu : Manipol termasuk perintjiannja beserta pedoman² pelaksanaannja, seperti Djarek, Resopim, Tahun Kemenangan, Amanat Pembangunan Presiden, Konsepsi Presiden, Membangun Dunia Kembali; atau USDEK, jaitu UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Nasional. Pendeknja jang termuat dalam semua bahan pokok indoktrinasi jang mengandung *sembilan wedjangan* Bung Karno jaitu wedjangan mengenai : 1) Revolusi, 2) Pantja Sila dan progresivisme, 3) kepribadian Indonesia jang berpusat kepada gotong-rojong, musjawarah dan mufakat, 4) persatuan nasional revolusioner, 5) membantras komunisto-phobi, 6) mutlak-perlunja poros Nasakom, 7) djahatnja liberalisme, 8) perlunja satu pimpinan nasional, 9) Sosialisme. (Takem, halaman 12). 9 Wedjangan ini adalah poros daripada semua bahan pokok indoktrinasi. Seperti dikatakan dalam Takem. 9 wedjangan ini harus mendjadi milik bersama, termasuk milik Angkatan Bersendjata.

Selandjutnja, pelaksanaan Manipol dibidang ekonomi haruslah berpedoman pada *Deklarasi Ekonomi* (DEKON), jaitu strategi dasar dan kebidjaksanaan djangka pendek dibidang ekonomi.

Sebagai program bersama dari Rakjat Indonesia Manipol memuat persoalan² jang penting dan pokok dari Revolusi Indonesia, jaitu : *pertama,*

Dasar/Tudjuan dan Kewadjiban² Revolusi Indonesia, kekuatan² Sosial Revolusi Indonesia, sifat Revolusi Indonesia, Haridepan Revolusi Indonesia dan Musuh² Revolusi Indonesia; dan *kedua*, Program Umum Revolusi Indonesia (Usaha² Pokok). (*Manipol*, Tubapi, hal. 79).

Manipol bukanlah hanja program pemerintah dan angkatan bersendjatanja, tetapi djuga program partai², organisasi² massa, dan perseorangan, pendeknja program dari Front Nasional. Sudah barang tentu tiap partai, tiap organisasi massa, dan tiap orang mempunjai programnja sendiri, tetapi semuanja dalam rangka pelaksanaan program bersama, Manipol.

Karena Manipol merupakan program bersama dari Rakjat Indonesia, maka dapatlah ditarik kesimpulan tentang siapa lawan dan siapa kawan, siapa reaksioner dan siapa revolusioner.

Kontradiksi antara Rakjat disatu fihak dan imperialisme serta feodalisme dan kakitangan²nja difihak lain mendjadi semakin tadjam dengan semakin berkembangnja perdjuangan Rakjat Indonesia. Manipol benar² mendjadi ukuran pemisah antara kekuatan revolusioner dan kekuatan reaksioner, kekuatan pro-Manipol dan kekuatan anti-Manipol.

UUD 1945 sebagai UUD Negara R.I. menjatakan dalam Pembukaannja a.l.: „mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Pernjataan ini dalam Manipol kita kenal dengan sebutan tiga kerangka sbb.:

Pertama: Pembentukan satu negara Republik Indonesia jang berbentuk Negara-Kesatuan dan Negara-Kebangsaan, jang demokratis dengan wilajah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke.

Kedua: Pembentukan satu masjarakat jang adil dan makmur materiil dan spirituil dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga: Pembentukan satu persahabatan jang baik antara Republik Indonesia dan semua negara didunia, terutama sekali dengan negara² Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar bekerdjasama membentuk satu dunia baru jang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menudju kepada perdamaian dunia jang sempurna. (*Manipol*, Tubapi, hal. 81)

Untuk dapat menegakkan tiga kerangka ini „Djarek" menundjukkan bahwa „dalam mempeladjari dan melaksanakan Manifesto Politik itu kita semua tidak boleh setengah-setengah. Aparatur Pemerintah, alat² Negara, Departemen², Universitas², Rakjat seluruhnja, semua, semua, tidak boleh setengah-setengah. Sebab Manifesto Politik adalah program perdjuangan negara, program perdjuangan masjarakat, program perdjuangan kita semua. Dan program perdjuangan besar tidak bisa mendjadi realitet djika dilajani dengan djiwa jang setengah-setengah". (*Djarek*, Tubapi, hal. 206).

Mempeladjari dan memahami Manipol berarti mempeladjari dan memahami program revolusi Indonesia, memahami tahap² dari revolusi Indonesia, jaitu „*pertama*, tahap mentjapai Indonesia

jang merdeka penuh, bersih dari imperialisme — dan jang demokratis — bersih dari sisa² feodalisme. Tahap ini masih harus diselesaikan dan disempurnakan ... *kedua*, tahap mentjapai Indonesia ber-Sosialisme Indonesia, bersih dari kapitalisme dan dari 'exploitation de l'homme par l'homme'. Tahap ini hanja bisa dilaksanakan dengan sempurna setelah tahap pertama sudah diselesaikan seluruhnja". (*Djarek*, Tubapi, hal. 171-172). Tidak mengetahui tentang adanja dua tahap revolusi Indonesia sama halnja dengan tidak mengetahui apa² tentang revolusi Indonesia.

Seperti diketahui Manipol dan perintjiannja sebagai Garis² Besar Haluan Negara RI telah diterima oleh PKI, karena ia memuat masalah² jang penting dan pokok dari revolusi Indonesia. Garis² Besar Haluan Negara mendjelaskan bahwa jang mendjadi sasaran² pokok (musuh² pokok) revolusi Indonesia jalah imperialisme dan feodalisme; bahwa *tugas²* revolusi Indonesia bukanlah mendirikan kekuasaan politik satu klas, satu golongan atau satu partai, tetapi kekuasaan politik seluruh Rakjat, kekuasaan Gotongrojong, menentang otokrasi atau kediktatoran, baik militer maupun perseorangan; bahwa *kekuatan pendorong* (penggerak) revolusi Indonesia bukanlah satu klas, satu golongan atau satu partai tetapi seluruh Rakjat Indonesia jang konsekwen anti-imperialisme dan anti-feodalisme dan kaum buruh dan kaum tani sebagai kekuatan pokoknja; bahwa *watak* (sifat) revolusi Indonesia adalah nasional demokratis; dan bahwa *haridepan* (perspektif) revolusi Indonesia adalah

Sosialisme, bukan kapitalisme.

Sedangkan mengenai garis² Besar Pola Pembangunan, PKI berpendapat bahwa pada pokoknja ia sesuai dengan watak revolusi Indonesia jang nasional dan demokratis, jang anti-imperialisme dan anti-feodalisme, jaitu tidak mementingkan investasi modal asing, tetapi mementingkan „landreform" dan pertanian, mementingkan industrialisasi dan industri berat, dengan menempatkan pertanian dan perkebunan sebagai basis ekonomi dan industri sebagai tulangpunggung, dan menempatkan ekonomi sektor negara pada kedudukan memimpin perekonomian negeri. Semuanja ini pada pokoknja djuga tertjermin dalam Dekon (Deklarasi Ekonomi).

Prinsip kegotongrojongan nasional berporoskan *Nasakom* telah merupakan sjarat bagi pelaksanaan Manipol, Pola Pembangunan dan Dekon setjara konsekwen, suatu prinsip jang tumbuh dalam proses gerakan pembebasan nasional Indonesia.

SJARAT² LAHIRNJA DAN PERKEMBANGAN MANIPOL

Sebelum Manipol lahir sudah ada ber-matjam² program Pemerintah, tetapi program² itu tidak mempunjai kemandang jang hebat seperti Manipol, sebab program² itu tidak mempunjai sjarat untuk berpadu dengan massa Rakjat.

Manipol lahir sebagai hasil dari perdjuangan Rakjat Indonesia melawan imperialisme dan feodalisme, hasil dari peladjaran² selama Revolusi

Agustus 1945, dan merupakan djalan keluar untuk mengatasi kebangkrutan „demokrasi liberal" serta pertjobaan diktatur militer dan selandjutnja dengan berpedoman Manipol berhasil menindas pemberontakan kontra-revolusioner PRRI-Permesta dan DI-TII.

Manipol lahir sesudah Konsepsi Presiden Sukarno tahun 1957, sesudah kegagalan Konstituante dan sesudah Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945 pada tanggal 5 Djuli 1959, dan sesudah pelarangan partai² kontra-revolusioner Masjumi-PSI, jaitu pada masa aliran² politik jang revolusioner, aliran Nasionalis, Agama dan Komunis, dengan gigih membela kesatuan Republik Indonesia.

Makaitu Manipol mentjerminkan kepentingan Rakjat Indonesia dan merupakan program perdjuangan dari Rakjat Indonesia. Manipol mentjerminkan kepentingan² kekuatan revolusioner dalam proses gerakan pembebasan nasional.

„Mempeladjari, mentjahari hubungan antara ketiga sifat itu (Nasionalis, Islam dan Marxis. DNA), membuktikan, bahwa tiga haluan ini dalam suatu negeri djadjahan tak guna berseteruan satu sama lain, membuktikan pula, bahwa ketiga gelombang ini bisa bekerdja ber-sama² mendjadi satu gelombang jang mahabesar dan mahakuat, satu ombak-taufan jang tak dapat ditahan terdjangnja, itulah kewadjiban jang kita semua harus memikulnja". (Bung Karno dalam *„Dibawah Bendera Revolusi"*, hal. 2).

Selandjutnja dinjatakan : „Apakah nasionalisme itu bisa rapatdiri dengan Marxisme jang internasional itu ? Dengan ketetapan hati kita mendjawab : Bisa !" (hal. 4) „Islamis jang luas pemandangan, Islamis jang mengerti akan kebutuhan² perlawanan kita, pastilah setudju akan persahabatan dengan kaum Marxis". (hal. 12)

Proses lahirnja ketiga aliran Nasakom adalah sbb. :

Nasionalisme : dimulai dengan Budi Utomo (1908), kemudian studiklub² kaum intelektuil; Nationaal Indische Partij; Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Indonesia (Partindo).

Islamisme : dimulai dengan Serikat Dagang Islam (SDI-1911); kemudian Sarekat Islam (SI-1912); Partai Serikat Islam (PSI) dan Partai Serikat Islam Indonesia (PSII); Nahdatul Ulama (NU) dll.

Marxisme (Komunisme) : dimulai dengan Serikat-Buruh² (SS Bond — 1905); VSTP (1908); Vaksentrale²; ISDV (1914) dan PKI (1920).

Gagasan NASAKOM sudah mempunjai akar sedjarahnja sedjak lahirnja gerakan nasional di Indonesia, terutama sedjak tulisan Bung Karno *„Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme"* tahun 1926, jaitu tahun pemberontakan nasional jang pertama di Indonesia, pemberontakan dibawah pimpinan PKI melawan kolonialisme Belanda.

Demikian djuga kami memandang *Pantjasila*, jaitu alat pemersatu nasion Indonesia dalam melawan imperialisme, tidak terlepas dari proses sedjarah gerakan pembebasan nasional jang men-

dahuluinja serta perkembangannja. Pantjasila tidak mungkin difahami oleh siapapun djika tidak memahami proses lahirnja gagasan NASAKOM.

Dalam pidatonja jang kemudian diberi nama „*Lahirnja Pantjasila*" Bung Karno setjara tepat mengatakan, bahwa perasan Pantjasila ialah Ekasila atau Gotongrojong. Djadi, Pantjasila adalah satu kesatuan, tidak boleh ditjopot-tjopoti menurut keinginan masing² golongan, misalnja golongan Nasionalis hanja mentjopot dan mengutamakan sila Kebangsaan, golongan Agama sila Ketuhanan Jang Maha Esa dan golongan Komunis sila Keadilan Sosial. Djika sudah main tjopot dan main utamakan sila tertentu, maka berachirlah Pantjasila sebagai alat pemersatu. Keprogresivan Pantjasila djustru karena ia „alat pemersatu", bukan alat pemetjah-belah. Pantjasila adalah alat pemersatu, baik untuk melawan imperialisme dan feodalisme, maupun untuk membangun Republik Indonesia jang bersatu, berdaulat, demokratis dan sedjahtera.

Kesatuan antara Pantjasila dan Progresivisme seperti jang dirumuskan dalam Sembilan Wedjangan Bung Karno (dari *Tahun Kemenangan*) dapat kita buktikan dalam penegasan Presiden dipidato *Resopim* sbb. :

„Siapa jang setudju kepada Pantjasila, harus setudju kepada NASAKOM, siapa jang tidak setudju kepada NASAKOM, sebenarnja tidak setudju kepada Pantjasila. Sekarang saja tambah. Siapa setudju kepada Undang² Dasar 45 harus setudju kepada NASAKOM, siapa jang tidak setudju kepada NASAKOM, sebenarnja tidak setudju kepada Undang² Dasar '45".

Ada sementara orang berbitjara tentang Pantjasila, tetapi jang dimaksudkan salahsatu silanja, misalnja Ketuhanan Jang Maha Esa atau Kebangsaan atau Keadilan Sosial sadja. Ini berarti melihat satu sila sebagai keseluruhan Pantjasila, atau melihat pohon sebagai hutan. Memahami Pantjasila sedemikian berarti bertentangan dengan djiwa Pantjasila itu sendiri, jaitu „alat pemersatu" atau „filsafat persatuan" (filsafat dalam arti jang sempit) dari nasion Indonesia. Setia kepada wedjangan „Pantjasila dan Progresivisme" tidaklah berarti pula bahwa kita harus mempersatukan kekuatan sembarang kekuatan, tapi kekuatan revolusioner; bukan „alle krachten", tapi „alle *revolutionaire* krachten".

Sekarang ini Manipol sebagai Garis² Besar Haluan Negara semakin hari semakin dipadukan dengan perdjuangan Rakjat Indonesia. Ini berarti bahwa Rakjat Indonesia semakin hari semakin memahami isi² Manipol dan mampu menggunakannja sebagai sendjata jang ampuh ditangannja.

Dengan tegas saja katakan bahwa : „Melaksanakan Manipol sama artinja dengan melaksanakan Program PKI sendiri, karena melaksanakan Manipol setjara konsekwen berarti melaksanakan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai keakar-akarnja, berarti menghapuskan imperialisme dan feodalisme sampai keakar-akarnja, guna selandjutnja menudju ke Sosialisme". (brosur *Satu Fikiran-Satu Hati-Satu Tudjuan*, hal. 21).

Sesuai dengan pidato „Djarek", Revolusi Indonesia tidak hanja harus berdjalan dari bawah, tetapi djuga harus dilakukan *dari atas*, dari Pemerintah dan alat² kekuasaannja, termasuk Angkatan Bersendjata, jaitu melakukan tindakan² revolusioner dari atas untuk melaksanakan Manipol setjara konsekwen.

Kekuasaan Negara Republik Indonesia dewasa ini terdiri dari *dua aspek*, jaitu *pertama*: aspek kekuatan² jang mewakili kepentingan² Rakjat, dan *kedua*: aspek jang mewakili kepentingan² musuh² Rakjat. Hal ini dapat dibuktikan dengan kedjadian² dimana kekuasaan negara RI benar² dapat berlaku sebagai wakil dan pembela kepentingan² Rakjat, misalnja dengan adanja Manipol, penindasan terhadap pemberontak² PRRI-Permesta, DI-TII, pembebasan Irian Barat, UUPA, UU-PBH, dan baru² ini Deklarasi Ekonomi. Difihak lain dengan kedjadian² dimana kekuasaan negara RI masih dapat digunakan untuk mewakili dan menguntungkan kepentingan² musuh Rakjat, seperti perlindungan² terhadap maskapai² minjak asing, UU Penanaman Modal Asing, penangkapan terhadap peserta demonstrasi² jang adil, terhadap kaum tani, kaum buruh, dll.

Tugas kaum revolusioner ialah terus mengembangkan kekuatan² jang mewakili kepentingan² Rakjat jang dalam kabinet dikepalai oleh Presiden Sukarno dan dimana kaum buruh dan kaum tani merupakan kekuatan pokok revolusi karena vitalnja dan banjak djumlahnja. Bersamaan dengan itu kaum revolusioner harus terus berdjuang untuk

mendobrak kekuatan² jang mewakili kepentingan² musuh² Rakjat, jaitu kekuatan² gelap jang sengadja merintangi perkembangan djalannja revolusi, chususnja merintangi kegotongrojongan nasional berporoskan NASAKOM.

MANIPOL DAN MARXISME

Seperti jang diterangkan dimuka, Marxisme di Indonesia sudah lama tumbuh, terutama sedjak tahun 1914 dengan berdirinja ISDV, jang dalam bulan Mei 1920 mendjadi PKI. Partai Marxis jang muda itu telah memimpin pemberontakan nasional tahun 1926-1927, kemudian dipaksa bekerdja dibawah tanah selama hampir 20 tahun oleh kaum kolonialis Belanda dan kaum fasis Djepang. Sedjak Revolusi Agustus 1945 PKI telah mengambil bagian aktif dalam revolusi itu. Sekarang dalam kehidupan politik Rakjat Indonesia PKI telah merupakan satu aliran dan kekuatan jang penting. Marxisme mendapat tempat jang baik dalam hati Rakjat Indonesia dan telah mendapat tempat dalam kehidupan politik, telah merupakan sesuatu jang sah. Pengakuan atas konsepsi NASAKOM sekaligus berarti pengakuan hakhidup bagi MARXISME dinegeri kita, sebagaimana halnja djuga dengan hakhidup bagi Nasionalisme dan Agama.

Marxisme terdiri dari tiga sumber dan tiga bagian, jaitu Filsafat, Ekonomi Politik dan Sosialisme.

Filsafat Marx bersumber pada filsafat klasik Djerman. Filsafat Marxisme adalah Materialisme Dialektik dan Histori. MDH tidak hanja merupakan salahsatu bagian, tetapi djuga dasar dari Marxisme. MDH bukan hanja sendjata untuk mengenal, tapi djuga untuk mengubah keadaan alam, masjarakat maupun fikiran manusia.

Ekonomi Politik Marx bersumber pada ekonomi klasik Inggeris. Adjaran tentang nilai-lebih, jaitu nilai jang dihasilkan oleh kaum buruh dan jang mendjadi sumber kekajaan seluruh klas kapitalis, adalah dasar teori ekonomi Marx. Ekonomi politik Marx mendjelaskan kedudukan klas buruh dalam sistim kapitalisme.

Sosialisme Marx bersumber pada adjaran Sosialisme klasik Perantjis. Berbeda dengan adjaran² sosialisme utopi Perantjis, Sosialisme Marx adalah ilmiah, berdasarkan hukum objektif perkembangan masjarakat manusia. Perdjuangan klas adalah lokomotif dari kemadjuan masjarakat. Untuk mendirikan masjarakat sosialis jang tiada penghisapan atas manusia oleh manusia tidaklah mungkin tanpa perdjuangan klas terhadap kaum kapitalis. Adalah omong kosong mau mentjapai Sosialisme tetapi tidak mau berdjuang melawan kapitalisme. Adalah benar sekali apa jang sering dikatakan oleh Presiden Sukarno, bahwa perdjuangan klas dikalangan Rakjat Indonesia tidak boleh diperuntjing, karena kontradiksi terpokok sekarang jalah kontradiksi antara seluruh Rakjat Indonesia, termasuk kaum kapitalis nasional jang patriotik, dengan kaum imperialis asing.

Dilihat dari asal-usulnja Marxisme, sebagaimana djuga halnja dengan agama² besar dan Nasionalisme-modern, bukanlah sesuatu jang „asli" Indonesia. Tetapi sebagai sesuatu jang universil, Marxisme djuga berlaku untuk Indonesia.

Sebagai ilmu, Marxisme terus berkembang, dikembangkan dan diperkaja oleh pengalaman² gerakan revolusioner tiap² negeri dan sedunia. Lenin telah mengembangkan dan memperkaja Marxisme, chususnja dengan adjaran²nja mengenai imperialisme dan revolusi sosialis. Berdasarkan teori Lenin itulah klas buruh Rusia telah memenangkan revolusi sosialis dan menegakkan negara Sosialis jang pertama didunia. Tjita² ilmiah Marx dan Engels mendjadi kenjataan, dan telah memberikan dorongan besar kepada gerakan² revolusioner disemua negeri.

Adjaran² Marx dan Lenin, terkenal dengan sebutan Marxisme-Leninisme, adalah adjaran universil, adalah pedoman untuk beraksi dan bukan mentera untuk „mengobati segala matjam penjakit". Hidup dan berkembangnja Marxisme atau Marxisme-Leninisme di Indonesia adalah berkat pemaduannja jang terus-menerus dengan gerakan revolusioner klas buruh dan Rakjat Indonesia lainnja. Berpedoman pada Marxisme-Leninisme, PKI setjara kreatif menentukan sendiri politik, taktik, bentuk perdjuangan dan bentuk organisasinja sesuai dengan kondisi² kongkrit di Indonesia. Dengan demikian PKI telah „meng-Indonesiakan" Marxisme-Leninisme.

Berdasarkan prinsip² itulah maka PKI, seperti jang sudah sering didjelaskan, dalam Kongres Nasional ke-VII, 1962, jang diadakan berhubung dengan adanja Penpres No. 7/1959, menekankan bahwa „Manipol adalah sesuai dengan program PKI, jaitu anti-imperialisme dan anti-feodalisme, bertudjuan mendirikan kekuasaan Rakjat gotong-rojong, bertudjuan membangun masjarakat sosialis, menggalang persahabatan antara bangsa² serta memperkuat perdamaian dunia". (*brosur Satu Fikiran-Satu Hati-Satu Tudjuan*, hal. 38).

Pembagian revolusi Indonesia setjara ilmiah dalam dua tahap, jaitu *pertama*, tahap revolusi nasional dan demokratis, dan *kedua*, tahap revolusi sosialis, adalah sesuai dengan pendirian PKI.

Sedangkan mengenai prinsip untuk menggalang semua kekuatan revolusioner seluas mungkin dengan Pantjasila sebagai alat-pemersatu dan berporoskan NASAKOM adalah sesuai dengan politik PKI untuk memobilisasi segenap potensi nasional jang revolusioner dan mementjilkan kekuatan jang reaksioner.

Mengenai kaum tani misalnja dinjatakan dalam *Djarek* sbb. : „Membebaskan kaum tani dari beban-beban feodal dan memberikan kepada mereka sebidang tanah garapan, menghapuskan sistim tuantanah akan menimbulkan elan revolusioner dikalangan kaum tani serta dapat membawa mereka kedalam arus revolusi untuk menjelesaikan tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus 1945". Pernjataan sedemikian sesuai dengan politik PKI untuk

membasmi sistim feodal dan mengikutsertakan kaum tani dalam gerakan revolusioner. Makaitu pernjataan jang menundjukkan bahwa „landreform" Indonesia bukanlah landreform Komunis hanjalah membukakan sifat² reaksioner sadja.

Seperti jang didjelaskan dimuka, dan djuga didjelaskan dalam DEKON, Sosialisme Indonesia adalah tugas tahap kedua dari revolusi Indonesia, jaitu setelah tugas tahap pertama selesai. Menempatkan Sosialisme Indonesia sebagai tugas tahap kedua adalah sesuai dengan politik PKI jang mendasarkan diri pada proses perkembangan masjarakat Indonesia sekarang, jaitu supaja segenap kekuatan lebih dulu ditudjukan untuk mengalahkan imperialisme dan feodalisme agar dengan demikian kita tjepat sampai ke Sosialisme. Anggapan sementara orang bahwa „sosialisme Indonesia bertentangan dengan Komunisme", „berlawanan dengan tudjuan PKI", hanjalah menelandjangi maksud-maksud reaksionernja sendiri, jaitu maksud memetjah persatuan nasional berporoskan NASAKOM.

Setelah menerangkan bahwa Manipol-Usdek bukan hanja tidak bertentangan dan malahan sesuai dengan Marxisme, perlu saja kemukakan bahwa ini tidak berarti Manipol adalah sama dengan Marxisme.

Manipol adalah program bersama dari Rakjat Indonesia jang terdiri dari tiga aliran politik jang besar, jaitu Nasionalis, Agama dan Komunis. Teranglah bahwa Manipol bukan hanja merupa-

kan program kaum Nasionalis, atau kaum Agama atau kaum Komunis sadja, melainkan program bersama.

Manipol adalah program seluruh Rakjat, sedangkan program PKI adalah program proletariat Indonesia atau program kaum Marxis Indonesia untuk seluruh Rakjat Indonesia. Makaitu dapat dikatakan bahwa kaum Komunis selama ini dan akan terus berdjuang untuk melaksanakan Manipol setjara konsekwen, karena pelaksanaan Manipol setjara konsekwen adalah sedjalan dengan pelaksanaan program PKI.

Dengan memahami aspek² persamaan dan aspek² perbedaannja antara Manipol dan Marxisme dapatlah kita dengan teguh mengabdikan diri pada tugas-tugas revolusi Indonesia, baik untuk tahap pertama maupun untuk tahap kedua, jaitu untuk penjelesaian Revolusi Agustus 1945 sampai keakar²nja, dan untuk pembangunan Sosialisme dikemudian hari.